

UPAYA PEMERINTAH CHINA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMBENTUKAN KERJASAMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) 2004-2012

ACHMAD YUSUF AL KATRA
NIM: 2012.051.0074

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Barat,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY 55183

Email: katra_07@yahoo.com

Abstrac - Globalization and liberalization has been makes Southeast Asia region become a target by china to creating free trade in term to develop their economy. Establishment of ACFTA has been makes China and ASEEAN as the biggest trade region in the world, seen from total population and being the third biggest trade seen from trade size. Cooperation of ACFTA expected could give the positive result in term to increase economic development both China and ASEAN for short and long term. The importance of this journal, explain that china attend in Southeast Asia region is not only as cooperation partner in trade however the China's need toward the sources of energy in Southeast Asia region. It is used to fulfill the demand of industrialization and get the position toward China's economic hegemony through ACFTA. It is expected that existence of United States and Japan which already appear in that area since years ago could be defeat. In this research the researcher uses theory of absolute advantage from Adam Smith And Concept sphere of influence. Then the last things the researcher uses the concept of hegemony from Antonio Gramsci. Those are the important base in explain this research.

Keywords: ASEAN-China Free Trade Area, China, Political Economy, China Hegemon, Tributary System.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasca perang dunia II tahun 1945, dunia berada di antara dua sistem yang sama sekali berbeda dalam hubungan internasional, pertama sistem teritorial yang menekankan pada penguasaan wilayah. Kedua Sistem Oceanic atau perdagangan sebagai warisan kebijaksanaan Inggris tahun 1850-an.

Dengan sistem teritorial yang menilai kekuasaan berdasarkan dari luas wilayah yang dimiliki semakin luas wilayah, semakin besar kekuasaan. Secara teoritis, Negara besar ingin mempunyai wilayah yang cukup luas sehingga mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada Negara lain, mereka bermaksud menguasai sumber-sumber alam, bahan

mentah dan daerah pasar agar mencapai kondisi swasembada dan swadaya. Sebaliknya, sistem Oceanic atau perdagangan berpandangan bahwa kondisi swasembada dapat dicapai melalui perdagangan bebas dan terbuka.

Sistem Oceanic atau perdagangan, pertama bermula pada tahun 1975 pada saat Amerika Serikat keluar dari Vietnam dengan adanya doktrin Nixon yang memaksa Negara-negara Asia untuk mengurus keamanannya sendiri. Sampai pada pertengahan 1980an AS dan banyak Negara industri maju lain mengalami kemerosotan ekonomi berkepanjangan. Dua peristiwa ini tercermin dalam perubahan kebijakan Negara-negara industri maju dalam memberi bantuan. Siring bergesernya waktu sistem geopolitik dan geoekonomi semakin tegas dengan negara-negara maju baik secara bilateral maupun multilateral dimana peran pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya ekonomi dengan cara meliberalisasikan pasar.

Perluasan dan peningkatan dengan sendirinya mengubah tatanan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Munculnya China sebagai negara besar Asia merupakan bentuk kekuatan dominan menggantikan AS dan Uni Soviet di kawasan Asia Pasifik.

Hubungan kerjasama China dan AS merupakan suatu proses transisi kekuatan suatu Negara yang awalnya menggunakan kekuatan politik dan militer untuk mencapai tujuan kepentingan nasional suatu Negara berganti menjadi kekuatan geoekonomi yang mendominasi kekuatan China dan AS melalui hubungan kerjasama di bidang ekonomi.

Hubungan kerjasama ini tidak lepas dari politik luar negeri AS pada masa perang dingin melihat komunisme sebagai ancaman utama di masa Reagan dan Bush, kedua pemimpin tersebut kurang menjalin hubungan kerjasama ekonomi dengan China disebabkan defisit perdagangan AS pada tahun 1980 dari US\$74 miliar melonjak menjadi US\$221 miliar, pada tahun 1987 akhirnya turun menjadi US\$150 miliar karena partai Demokrat dan partai Republik di kongres menolak untuk mengurangi belanja pemerintah serta adanya pelanggaran HAM yang dilakukan China pada krisis selat Taiwan pada peristiwa Tiananmen 1989.

Pada tahun 1990-2000 China menjadi negara penggerak pertumbuhan ekonomi dunia dari segi penguasaan pasar dan ekspor kemudian disusul oleh AS dan Jepang. Rasio export China terhadap AS pada tahun 2001 adalah 20% dari jumlah export AS, dan export dari China terhadap Jepang pada tahun yang sama adalah 18% dari jumlah ekspor Jepang. Hal ini menunjukkan kekuatan pasar China yang mendominasi dari Negara-negara besar.

Munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Pasifik tidak lepas dari peran pemimpin yang dituangkan dalam kebijakan politik dan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Deng Xiou Ping telah membawa China dalam perubahan ekonomi dalam mencanangkan reformasi ekonomi di segala bidang dan dikenal sebagai ekonomi pasar sosialis China serta direalisasikan dengan Pembentukan Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zone atau SEZs). China dengan kekuatan perekonomiannya mampu membawa ekspansi pasar pada negara-negara Asia dan menimbulkan rasa kekhawatiran AS dan Negara-negara maju maupun negara berkembang lainnya. Ekspansi ini telah membuka peluang pasar global bagi negara-negara maju dan berkembang agar dapat bersaing di era globalisasi.

Pada percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi. Dalam suatu era globalisasi, perdagangan bebas merupakan hal yang sering diperbincangkan karena diharapkan membawa perubahan penting bagi tatanan perdagangan dunia.

Salah satu perjanjian perdagangan regional saat ini adalah Asean Free Trade Area (AFTA) yang diprakarsai oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebuah organisasi regional Negara-negara di Asia Tenggara. AFTA lahir pada tahun 1995 dengan tujuan strategis AFTA untuk meningkatkan keunggulan komparatif regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai suatu kesatuan unit produksi dan mampu memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi Negara-negara yang berasal dari ASEAN. (Diiby, 2004)

Adapun hubungan China dengan ASEAN tidak luput pula dari kecurigaan satu dengan lainnya. China menganggap kehadiran ASEAN dalam politik regional di dekade 60-an sebagai bentuk ancaman barat terhadap China. Anggota ASEAN pada dasarnya merupakan anggota dari organisasi kemandirian regional yang dibentuk dan dikendalikan oleh AS dan Inggris (Collective Defence Treaty, SEATO, Five Power Defence Arrangement). Disamping itu, Negara-negara ASEAN mencurigai China sebagai induk dari gerakan komunisme di Asia Tenggara. Alasan agama merupakan penghalang hubungan China dengan ASEAN pada awalnya melihat mayoritas agama di kawasan Asia Tenggara adalah Muslim dan Kristen sementara China adalah komunis ateis. (Cipto, 2007:69)

Titik awal perubahan hubungan ASEAN dengan China setelah Deng Xiou Ping melancarkan reformasi politik ekonomi. Di mulai dari akhir dekade 70-an Deng membuat China terbuka dengan dunia luar dan memulai membuka pintu investasi asing. Pendekatan China terhadap ASEAN di mulai dengan mengurangi dukungan China terhadap gerakan kumunis di Negara-negara ASEAN. Upaya demi upaya berhasil China wujudkan agar mendapatkan perhatian dari ASEAN hingga puncaknya pada Juli 1991 Menteri Luar Negeri China Qian Qichen menghadiri pembukaan ASEAN Ministerial Meeting ke-24. China memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan niatnya agar dapat berkerjasama dengan ASEAN yang ditanggapi positif oleh ASEAN dengan memberikan status Mitra Konsultasi kepada China. Buah hasil dari pendekatan China ini segera dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan ASEAN. Tahun 1994 China diterima ASEAN dalam pertemuan ASEAN Regional Forum dengan mempertimbangkan posisi strategis dan potensi pasar China yang sedemikian besar. Berselang tiga tahun kedepan China mulai terlibat dalam pertemuan ASEAN+3 pada 1997, pertemuan ini sangat diharapkan oleh China melihat proses pendekatan China dengan ASEAN semakin terbangun. ACFTA pertama kali di inisiasi oleh China pada November tahun 2000. Dasar dari inisiasi ACFTA adalah dengan penandatanganan ASEAN- China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal November 2001 di Brunei Darussalam, sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA. Puncak pertemuan ASEAN dengan China akhirnya berlangsung dalam Pertemuan Puncak ASEAN tahun 2003. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menandatangani

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and China. Kesepakatan tersebut merupakan langkah awal persiapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area. (*Ibid*, 170-173)

Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA) yang merupakan titik awal proses terbentuknya perdagangan bebas antar China dan Negara-negara ASEAN. Secara formal ACFTA pertama kali di luncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Amandemen pertama kali ini di fokuskan kepada perdagangan bebas di Vietnam, agar Vietnam menurunkan tarif dan menempatkan amandemen tersebut sebagai panduan perdagangan internasional mereka.

Fase awal dari kesepakatan yang dikenal dengan Program Panel Awal EHP (Early Harvest Programme) ACFTA yang berlaku pada 1 Januari 2004 dan pada tanggal 1 Januari 2010 di berlakukan kepada 6 Negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini merupakan langkah awal perdagangan bebas untuk saling meningkatkan pasar ekonomi global dan saling meningkatkan GDP ASEAN dan China untuk masa mendatang. (Sumaryadi, 2001)

Landasan Pemikiran

1. Teori Absolute Advantage

Adam Smith berpendapat dengan teori Absolute Advantage bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Kekayaan suatu Negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan bertambah sesuai dengan skill, serta efisiensi dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. Suatu Negara mengekspor barang tertentu karena Negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada Negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak merupakan kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan Negara-Negara lain.

Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan teori murni (pure theory) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut.

2. Konsep Hegemoni

Konsep hegemoni Gramsci yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, hegemoni dalam Bahasa Yunani kuno disebut 'eugomonia' sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi atas Negara-negara kota secara individual. Menurut Gramsci, kelas social akan memperoleh keuntungan melalui dua cara yaitu, pertama, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan

kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara dominasi (*dominio*) atau paksaan (*coercion*) dengan secara konsensual. Kedua, melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari ‘perspektif ganda’ suatu tindakan politik kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Gramsci menganggap langkah-langkah pragmatis tersebut dibutuhkan oleh tiap kelompok yang hendak meraih kekuasaan, ia juga memiliki kepedulian etis yang sangat mendalam terhadap cara berjalannya proses tersebut.

Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah harus menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok sosial tersebut menjadi dominan ketika ia mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih harus terus “memimpin” juga.

Manifestasi dalam cara kepemimpinan moral dan intelektual menjadi landasan dasar dari hegemoni. Konsep hegemoni sangat terkait dengan kontrol sosial suatu kelas atau kelompok tertentu terhadap kelas yang lain, terutama kelas yang berada pada tingkatan bawah (*subaltern*). Kontrol sosial memiliki bentuk secara internal melalui pembentukan keyakinan-keyakinan personal menjadi sebuah bentuk norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, hegemoni merupakan sebuah bentuk khusus dari relasi kekuasaan sosial di mana kelompok-kelompok yang dominan mengamankan posisi istimewa mereka sebagian besar melalui cara-cara yang bersifat konsensual terkait dengan persetujuan

3. Konsep Sphere of Influence

Konsep *sphere of influence* secara umum terkait dengan tradisi geopolitik, yang mana mempelajari hubungan antara daerah teritorial dan politik. Geopolitik terlihat sebagai bentuk motivasi politik dan merupakan sebuah alat untuk mencapai kekuatan.

Tindakan pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain, yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan. Tindakan juga dapat dianggap sebagai isyarat yang dikirimkan oleh seorang aktor untuk mempengaruhi pandangan si penerima mengenai si pengirim. Atau dengan kata lain, politik luar negeri selalu diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan nasional. Politik semacam ini selalu berusaha manfaat maksimal dalam konstelasi politik internasional.

Tujuan optimal Politik Luar Negeri adalah mengarah kepada faktor *external*, yaitu upaya realisasi dari kepentingan nasional yang dilegitimasi ke dalam lingkup internasional. Di dalam Negara-negara maju untuk diartikan sebagai Negara yang memiliki kemampuan yang unggul. Tujuan ini diarahkan untuk mempercepat terealisasinya tujuan tersebut. Terutama sebagai akibat adanya aksi, kekuatan, kemampuan dan pengaruh yang berfungsi sebagai komponen-komponen untuk menunjang tujuan utama yang bersifat

kontemporer dari politik luar negeri. Konsekuensi logis dari adanya kemampuan yang dimiliki negeri tersebut.

Jack C. Plano, mengartikan *influence* (pengaruh), sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku aktor lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil, dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau mencegah perubahan yang tidak diinginkan pada kecenderungan pendapat, sikap, dan keyakinan atau pada tingkah laku lain yang dapat terlihat.

Kemampuan pelaku mempengaruhi aktor lain, tergantung pada banyak faktor. Diantaranya adalah faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat pengaruh yang digunakan, cakupan tugas atau dasar wewenang dan pengaruh, kualitas kompetitif dari pihak lain yang juga tengah melancarkan pengaruh, dan derajat tuntutan penyesuaian kemampuan maksimum pelaku/aktor untuk mengubah tingkah laku aktor lain jarang digunakan. Karena biaya politik bagi sebuah aktor atau penyebab lainnya mungkin akan mengakibatkan pencurahan daya politik aktor tadi.

Jack C. Plano juga memperjelas dimana ada sebuah wilayah yang didominasi oleh kepentingan nasional dari sebuah kekuatan tertentu. Dalam sebuah kawasan pengaruh (*sphere of influence*) kekuatan besar tersebut memang tidak mempunyai kekuatan Formal atas Negara-negara yang ada di dalam wilayah pengaruhnya. Tetapi aktor besar tersebut dalam kenyataannya mampu memaksa pihak lain untuk menerima sebuah ketaatan tingkah laku politik sesuai dengan kepentingan negara besar tersebut.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan Perekonomian China

China pada tiga puluh tahun yang lalu memiliki jejak kaki kecil dalam ekonomi global dan hanya memiliki pengaruh kecil di luar batas China, kecuali beberapa negara yang memiliki hubungan militer dan politik yang dekat dengannya. Kemampuan ekonomi yang masih relatif kecil tidak membuat China pantang meyerah secara geografis China merupakan negara terbesar ketiga di dunia dengan luas wilayah sekitar 9,69 juta km² dan China merupakan negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Penduduk China 85% tinggal di wilayah pedesaan dan 90% daripadanya menempati seperenam wilayah di China. Dari keseluruhan luas wilayah China, hanya 15% yang memiliki potensi untuk pertanian. Dan dengan total penduduk yang mencapai hingga 1,361 miliar jiwa, menobatkan China sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.

Seiring berjalannya waktu China beberapa kali mengalami revolusi yang panjang pasca runtuhnya masa Dinasti Ching. Masa revolusi yang panjang dengan sendirinya melahirkan para pemimpin yang mampu membawa China hingga masa dimana sektor ekonomi sebagai wadah kekuatan besar. Kekuatan ekonomi China yang luar biasa merupakan magnet pusat industri manufaktur dunia, jasa penyedia dana paling terkemuka, investor utama di dunia, serta sumber riset dan pengembangan ilmu science yang semakin meluas.

Pemerintah China berada di puncak cadangan devisa yang mencengangkan lebih dari US\$ 2 triliun. Tidak ada satu pun bisnis di mana pun yang tidak merasakan dampak pengaruh China, baik sebagai pemasok barang-barang yang murah maupun sebagai pesaing yang tangguh. Dibalik perkembangan ekonomi yang pesat, China telah memulai reformasi dalam bidang ekonomi sejak tahun 1978 dengan dilakukan liberalisasi di mana lahan-lahan yang dikelola oleh negara kemudian diprivatisasi dalam arti pemindahan dari tangan negara ke swasta. Selain melakukan reformasi, pada tahun 1997 Pemerintah China juga mengatur kebijakan terkait bidang ekonomi dengan menerbitkan kebijakan mengenai pendapatan warga China yang dibagi rata dihapuskan pada masa tersebut. Kunci keberhasilan reformasi dalam bidang ekonomi tidak lepas dari kesabaran pemerintah China dalam menempatkan ‘arah reformasi’ pada koridor yang ditetapkan guna mencapai hasil di masa mendatang. Sesuai dengan pesan dan arahan Deng Xiaoping, “Membangun China seperti menyeberangi sungai dengan merasakan bebatuan yang terinjak kaki”. Sikap pragmatis juga ditunjukkan dalam memilih orang seperti yang dikatakannya, “Saya tidak peduli apakah kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting kucing itu bisa menangkap tikus”. Proses yang panjang dan melelahkan pada akhirnya mampu membuktikan bahwa revolusi dan reformasi merupakan salah satu upaya pemerintah China guna mencapai keberhasilan di masa sekarang.

Disamping itu China menerapkan strategi pengembangan ekonomi dalam regional preeminence dan global influence. Kedua hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kekuatan internasional, terkait dengan status China sebagai pemimpin Asia dan peran sentral dalam organisasi internasional, merupakan sarana untuk mengembangkan perekonomian nasional. (Koesmawan, 2002)

Pertumbuhan Ekonomi China sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang masyarakat China dalam berevolusi dalam bidang ekonomi. Berdasarkan catatan China, China adalah sebagai kekuatan stabilitas, sering dikatakan bahwa China telah membawa dunia menuju persatuan dan perdamaian. Tidak berhenti disitu, China memulai memproyeksi modernisasi melalui pembangunan ekonomi untuk mencapai kemajuan ekonomi diringi kesejahteraan masyarakatnya dan memantapkan sistem politik demokrasi. Namun, untuk mencapai modernisasi tidak dapat secara bersamaan dapat meraih kedua keinginan tersebut, salah satu harus menjadi prioritas utama. Pada negara-negara sedang berkembang lebih memprioritaskan kepada kemakmuran kemudian disusul dengan membangun sistem politik demokratis.

China menempuh jalan dengan mengembangkan model East Asian Model of State-led Economic Development. Model ini menempatkan negara sebagai pemegang kendali kebijakan reformasi ekonomi dan sementara mengesampingkan sistem demokrasi. China merupakan fenomena yang jelas, yang sedang memacu proyek modernisasi, untuk mencapai sebagai negara raksasa ekonomi dunia pada pertengahan abad ke-21.

Namun, usaha menuju puncak kekuatan ekonomi dunia justru dikendalikan oleh rezim otoriter. Fenomena China jelas di luar kelaziman, sangat berbeda dengan pengalaman negara-negara Eropa dan Amerika. Kemajuan ekonomi hanya kondusif dibawah sistem

politik demokrasi. Pola di luar kelaziman ini disebut dengan market capitalism without democracy. (Perenboom, 2007:5)

Bersamaan dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang rata-rata tumbuh 10% sejak 1980-an, China bangkit sebagai negara super power baru yang secara geopolitik berpotensi menjadi ancaman besar bagi negara-negara industri maju. Tak heran, negara-negara Barat gencar melancarkan propaganda agar China mempromosikan demokrasi dan HAM sebagai bagian agenda pembangunan, yang kini menjadi arus utama permainan global. Namun, China bergeming, teguh menempuh jalan politik sendiri yang lebih cocok dengan kebutuhan domestik.

China dalam Pasar Global

China merupakan sebuah negara yang dikenal memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data pada tahun 2015 penduduk di China mencapai 1,376 miliar jiwa, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata minimal 9.53%. Hal ini terus bergulir hingga merambah ke Asia Tenggara, “tanpa kehadiran jaringan bisnis China yang sangat kuat ini, kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara tidak akan semaju sekarang”. (Bawono, 2008:30) Kebangkitan perekonomian China memang dirasakan bahwa negeri tersebut sedang menyiapkan sesuatu yang besar dalam berbagai hal sebab jumlah orang yang dilayani juga besar. Perkembangan perekonomian China yang melesat secara signifikan membuat kekhawatiran bagi banyak negara, bahkan untuk bergabungnya China kedalam WTO (World Trade Organization) harus melalui proses yang panjang dengan dihadapkan oleh berbagai macam hambatan. Semenjak “Empat Modernisasi” diluncurkan pada 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, pertumbuhan China rata-rata tercatat 9,8 persen per tahunnya. Bahkan pernah mencapai 11,4 persen untuk tahun 2007, dan menjadi pertumbuhan tahunan tercepat sejak 1994. Kemajuan pesat China tersebut banyak membuat kekhawatiran, termasuk A.S. sekalipun.

Gerakan ekonomi China yang berhasil menyentuh ekonomi dunia. Secara perlahan namun pasti, China pun mulai sibuk menguasai banyak perusahaan-perusahaan besar dan strategis di berbagai negara. Dengan dana siap pakai berupa cadangan devisa yang mencapai sekitar 2,4 triliun US Dollar, tentu bukan persoalan yang sulit. Melalui salah satu instansi negaranya, China Investment Corporation (CIC) yang didirikan 29 September 2007 lalu, China semakin agresif berburu investasi di berbagai negara. CIC sendiri mengelola sekitar 200 milyar US Dollar dari jumlah cadangan devisa milik China. Dengan dana kelolaan sebesar itu, tidak mengherankan lagi China merupakan raksasa yang benar-benar telah terbangun dari tidurnya.

Tidak hanya kemajuan perekonomian China yang berpengaruh terhadap perekonomian global, namun perlambatan ekonomi China pernah terjadi dan menciptakan rasa kekhawatiran yang dirasakan banyak pihak, seperti para perusahaan raksasa dunia. Perlambatan ekonomi tersebut menular ke beberapa perekonomian negara di kawasan Amerika Latin. Demikian pula perusahaan-perusahaan di Eropa mengalami kemerosotan pada nilai profitnya. Bahkan beberapa negara berkembang di Asia mengalami tekanan pada nilai tukar mata uang.

Pengaruh Ekonomi China di Kawasan Asia Tenggara

Perkembangan politik di Asia Tenggara dewasa ini telah melahirkan tantangan, tekanan dan sekaligus peluang-peluang baru bagi China. Dalam perubahan strategis dan ekonomi di Kawasan Asia Tenggara, China menunjukkan sikap yang lebih fleksibel. China menjadi aktif dalam pengembangan regionalisme ekonomi dan keamanan. Sikap ini membuat China menjadi lebih di terima di kawasan dan mempunyai posisi lebih kuat dalam persaingannya dengan kekuatan-kekuatan regional lainnya. Sementara itu, bagi ASEAN yang merupakan organisasi regional dari negara-negara Asia Tenggara menganggap kebangkitan China tidak dapat dihindari. Jalan terbaik bagi ASEAN adalah mengembangkan pendekatan-pendekatan multilateral untuk mencegah dominasi China di kawasan Asia Tenggara. Bersamaan dengan ini, ASEAN melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat posisi dalam perkembangan baru kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Berbagai analisa tentang China sepakat bahwa saat ini China telah menjadi kekuatan dunia dan makin percaya diri dalam politik luar negerinya khususnya dalam mempengaruhi multilateralisme di kawasan Asia Tenggara dan Timur.

China menunjukkan rasa nyaman dengan multilateralisme yang dikembangkan oleh ASEAN. Semula Cina mencurigai multilateralisme sebagai bagian dari upaya negara-negara Barat untuk membendung China. Dalam perkembangan selanjutnya, China berhasil mengambil manfaat multilateralisme sebagai upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional tentang kebangkitan China yang damai dan memberikan sumbangan terhadap keamanan dan perekonomian dunia.

Sampainya sinyal-sinyal positif China kepada ASEAN, dengan rasa percaya diri ASEAN kemudian semakin melebarkan sayapnya dengan adanya ASEAN+3 sebagai sebuah forum yang ditetapkan pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya pernyataan bersama mengenai kerjasama Asia Timur pada ASEAN+3. Regionalisme ASEAN+3 kemudian meluas hingga dibentuknya kawasan perdagangan bebas Asia Timur (EAFTA) yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara di Asia Timur. Disamping itu semua pihak ASEAN, dengan bangkitnya China sebagai kekuatan besar yang mempunyai kepentingan strategis di kawasan tidak dapat dihindarkan, termasuk di dalamnya adalah persaingan antara China dengan kekuatan eksternal lain yaitu India, Jepang, dan A.S. Langkah terbaik bagi ASEAN adalah dengan mengembangkan regionalisme multilateral melalui berbagai forum seperti ARF, ASEAN Plus Three (APT), dan East Asia Summit (EAS). (Jurnal Penelitian Politik, 2007:101-102)

China mulai membangun berbagai macam kerjasama di bidang ekonomi di kawasan Asia Timur maupun Asia Tenggara. Framework Agreement on ASEAN-China Economic Cooperation (ACFTA) yang ditandatangani pada pertemuan ASEAN-China keenam di Kamboja, tahun 2002 menyepakati bahwa ASEAN dan China akan membentuk kawasan area perdagangan bebas (FTA) dalam waktu 10 tahun ACFTA bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara yang terlibat di dalamnya, sekaligus menghapus hambatan-hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. Artinya, ACFTA merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kalangan industri untuk meningkatkan kualitas produk untuk bisa

disejajarkan dengan produk-produk dari negara-negara anggota lainnya. FTA ini merupakan FTA pertama yang ditandatangani China dengan rekan dagangnya. Kerangka FTA bukan sekedar perjanjian ekonomi semata, namun memiliki dampak yang sangat penting secara politik. Keputusan kedua belah pihak dengan membentuk FTA tentu mengisyaratkan hubungan ekonomi-politik yang akan terus meningkat sebagaimana rasa saling percaya dan saling ketergantungan di antara keduanya.

C. HUBUNGAN KERJASAMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dengan China, dengan menghilangkan atau mengurangi segala bentuk hambatan perdagangan, baik tarif atau non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, peningkatan integrasi ekonomi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. Pembentukan ACFTA ditandai dengan penandatanganan ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation oleh kepala negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. (Burmansyah, 2014:34-35)

Sebelum tahun 1990-an, belum ada hubungan secara resmi antara ASEAN dengan China. Meskipun hubungan bilateral beberapa negara anggota ASEAN secara individual dengan China sudah terbentuk, misalnya Thailand. Pada Juli 1991, Menteri Luar Negeri China saat itu, Qian Qichen menghadiri pembukaan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur. Pada kesempatan tersebut Menlu China Qian Qichen menyampaikan keinginan pemerintah China untuk dapat berkerjasama dengan ASEAN. Hal ini disambut positif, dengan respon yaitu sebuah kunjungan Sekjen ASEAN Dato' Ajit Singh ke Beijing pada September 1993 dan menyepakati pembentukan dua Joint Committee yaitu pada bidang kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama ekonomi dan perdagangan yang diresmikan pada Juli 1994 di Bangkok oleh Sekjen ASEAN dan Departemen Luar Negeri China.

Ide untuk membentuk ACFTA pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri China Zhu Rongji dalam ASEAN+3 Summit di Singapura November 2001. Melihat hal tersebut dibentuklah kelompok ahli dari kedua belah pihak yang disebut ASEAN-China Expert Group, guna mempelajari kemungkinan terbentuknya ACFTA. Pada tahun 2002 kelompok ahli mengemukakan bahwa ACFTA dalam jangka waktu 10 tahun akan menciptakan kawasan ekonomi dengan populasi 1,7 milyar penduduk, dengan total GDP (Gross Domestic Product) regional mencapai 2 triliun dolar AS dan total perdagangan keduanya diperkirakan mencapai 1,23 triliun dolar AS. (Wibowo, 2011:43-44) Dalam proses selanjutnya pada ASEAN-China Summit ke-6 tahun 2002 di Kamboja, para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri China Zhu Rongji menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation. Kerangka tersebut merupakan landasan kerjasama dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yang ditargetkan akan dicapai pada 2010 untuk ASEAN-6 dan pada 2015 untuk ASEAN-CMLV. ACFTA secara formal pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation dan Dispute Settlement Mechanism Agreement pada

tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Sementara itu persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Dan persetujuan investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN, pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. (Direktorat Kerjasama Regional , 1)

Adapun tujuan dari Framework Agreement tersebut adalah untuk (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua belah pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tariff; (c) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap pada kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ACFTA tidak hanya sekedar perjanjian perdagangan bebas melainkan telah mengadopsi model perdagangan abad 21 yang berporos pada perdagangan jasa dan investasi. Dalam perdagangan abad 21, keterkaitan antara perdagangan dan jasa-investasi memiliki hubungan yang kompleks. Produksi barang-barang dapat dikategorikan sebagai jasa-jasa, dan sebaliknya; jasa dapat dikategorikan sebagai barang. Demikian dengan investasi yang merupakan sebagai perdagangan, dan sebaliknya. Dalam hal ini perdagangan abad 21 dikenal sebagai perdagangan rantai pasokan (supply chain trade).

Kerjasama ACFTA Sebagai Usaha China Mendapatkan Sumber Energi

Sebagai kawasan perdagangan bebas, ACFTA memiliki total konsumen sekitar 1,978 miliar dengan pendapatan nasional per kapita yang bervariasi diantara negara anggota. Dengan total jumlah konsumen tersebut, zona ACFTA merupakan FTA terbesar di dunia yang mampu dibentuk oleh negara-negara berkembang. ACFTA menjadi lebih ambisius karena FTA tersebut tidak hanya mengamankan liberalisasi perdagangan barang dan jasa melainkan mendorong investasi serta kerjasama ekonomi yang lebih maju, tidak hanya sekedar kawasan perdagangan bebas melainkan meliputi kearah integrasi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi China yang semakin pesat dengan menekankan pada sektor perdagangan di bidang ekspor import. Tentu dari kerjasama ACFTA China berharap banyak, terutama pada barang-barang mentah sebagai sumber daya. Dalam hal ini menjadi prioritas perhatian bagi para pembuat kebijakan di negara-negara anggota ASEAN, pertumbuhan ekonomi China yang semakin tidak terbendung mendorong China untuk terus melakukan perluasan perdagangan ke luar negeri. Disamping itu kekhawatiran bahwa industri di China akan terus melakukan permintaan akan sumber daya yang akan menjadi motivasi China dalam melakukan perluasan perdagangan. (Cheng, 2013:315)

Secara keseluruhan dari tahun 1998 hingga tahun 2013 total ekspor dari ASEAN menuju China rata-rata sebesar 100,1 miliar dollar. Dan ekspor dari China menuju ASEAN rata-rata sebesar 94,1 miliar dollar. Negara-negara ASEAN telah mendirikan intergerasi secara bersama sebagai rantai kebutuhan dengan China dan Asia Utara, sebagian besar fungsi China sebagai negara manufaktur dan industri.

keadaan China yang selalu unggul atas kompetisi perdagangan dunia. Secara internal China memiliki permasalahan yang cukup serius untuk diperhatikan. Kekuatan pada bidang

ekonomi China dengan potensi pasar yang besar akan meningkatkan permintaan produk barang dan jasa serta barang modal. Demikian industri China terus berkembang sehingga China membutuhkan bahan impor guna mendukung perkembangan ekonomi. Disamping itu China memerlukan perluasan investasi di negara-negara lain yang terkait dengan industri yang China miliki. Kebutuhan akan sumber daya energi merupakan faktor utama China untuk dapat terus melangsungkan usaha ekspor pasar yang terus melesat tinggi.

China selalu kekurangan sumber daya alam untuk sebuah negara yang mempunyai populasi besar, sebagaimana ungkapkan oleh Duta Besar China untuk Australia “Peningkatan permintaan untuk sumber daya mineral dan energy merupakan tantangan yang serius, namun sebagai penyedia kita tidak bisa untuk memenuhi permintaan tersebut. Sesuai estimasi pada tahun 2010, China akan mengimpor 1/3 kebutuhan mineral. Dan sangat membutuhkan kebijaksanaan dan kesadaran dalam mengelola pertumbuhan kita.” (Chow, 2006:259)

International Energy Agency (IEA) memperkirakan bahwa pasca era pemerintah Deng, impor minyak China akan terus melesat melampaui impor negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Adapun IEA World Energy Outlook menunjukkan bahwa minyak yang menempati porsi sebesar 20% dari konsumsi energi komersial China pada tahun 1996, akan terus meningkat menjadi 26% pada tahun 2020 dengan jumlah impor sebesar 8 juta barel per hari atau 400 juta ton per tahun. Perkiraan ini melampaui proyeksi impor bersih negara-negara OECD Pasifik yaitu Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Kebutuhan akan konsumsi minyak akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi China.

Hal ini diperkuat dengan kehadiran industrialisasi yang berhasil menopang perekonomian China berdampak pada meningkatnya akan konsumsi energi. Permintaan China untuk energi khususnya minyak terus meningkat. Pada tahun 1993-2006, konsumsi minyak China hampir dua kali lipat dari 2,9 juta barel per hari menjadi 7 juta per hari. Pemerintah China memperkirakan permintaan atas konsumsi energi akan berlipat ganda di tahun 2005-2015. Dalam hal ini kebutuhan China untuk memenuhi peningkatan permintaan minyak, China telah menjadi net oil importir sejak tahun 1993, menyalip Jepang pada tahun 2003 sebagai konsumen minyak kedua terbesar di dunia setelah Amerika. (Ciptowiyono, 2013)

Sebelum tahun 1993, jumlah produksi dan ekspor minyak China lebih besar dibandingkan dengan jumlah impor. Hampir sebagian besar minyak yang diekspor China diperoleh dari ladang minyak Daqing di ujung timur laut China. Seiring berjalannya waktu, persediaan minyak di Daqing semakin menipis sehingga produksi minyak tidak lagi mampu untuk mengimbangi konsumsi minyak untuk industrialisasi di China. Dalam tahun-tahun berikutnya kebutuhan China akan minyak semakin menjadi krusial hal ini menunjukkan kondisi kebutuhan energi China telah berubah. Perubahan ini mendorong China akan kebutuhan energi minyak guna mencukupi ketersediaan atas kebutuhan industrialisasi dan kerjasama dalam bidang ekonomi menjadi salah satu prioritas.

Dalam mencari solusi atas kebutuhan sumber energi, China menerapkan strategi ‘going out’ pada masa pemerintahan Jiang Zemin. Melalui strategi ‘going out’ pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan nasional China untuk meningkatkan investasi di luar

negeri. China membutuhkan akses terhadap pasar internasional untuk mendapatkan ketersediaan minyak dan gas alam dalam jumlah yang lebih besar. Oleh sebab itu China mulai melakukan pendekatan intensif dan menanamkan investasi di berbagai kawasan, terutama di negara-negara penghasil minyak yang potensial untuk dijadikan pasar bagi barang-barang produksi China sekaligus sebagai pemasok kebutuhan energi China.

Dari tahun 1990 hingga 2011 ASEAN secara keseluruhan memiliki cadangan minyak sebesar 13 miliar barel. Asia Tenggara akan tetap menjadi kawasan yang paling berpotensi dalam sumber energi, melihat masih banyaknya wilayah yang belum dijelajahi yang mana masih terdapat sumber energi yang lebih besar. Namun, hingga saat ini negara-negara ASEAN masih dihadapi kendala atas isu kepemilikan wilayah dan teknologi yang tidak sepenuhnya memumpuni. (World Energy Outlook Special Report, 2013:21)

Produksi bahan bakar fosil di Asia Tenggara didominasi oleh sumber daya dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Secara keseluruhan sumber bahan bakar fosil diungguli dengan produksi minyak yang mencapai 90% dengan total 537 juta ton. Produksi sumber bahan bakar fosil yang dihasilkan Asia Tenggara tumbuh dengan sangat pesat selama dua dekade terakhir yang menjadikan Asia Tenggara mendapatkan permintaan yang cukup besar atas kesempatan ekspor. Kemudian dalam perkembangannya, ekspor negara-negara ASEAN kepada China cukuplah besar dilihat dari data pada tahun 2008 hingga tahun 2014 tercatat export negara-negara ASEAN menuju China mendominasi export luar ASEAN.

Kerjasama dengan berbagai negara dilakukan dalam sektor eksploitasi dan distribusi energi. Tiga kawasan sumber energi strategis China yaitu Asia Tengah, Russia, Timur Tengah, dan Afrika Utara, dan Amerika Selatan. Namun, kondisi politik yang cenderung tidak stabil serta rute perjalanan impor yang jauh maka China mencoba mencari strategi lain dengan memperhatikan Asia Tenggara. (Wesley, 2007:56)

Upaya China Mengimbangi Dominasi Hegemoni Ekonomi Amerika dan Jepang di Kawasan Asia Tenggara

Selama perang dingin, kawasan Asia Timur menjadi prioritas perhatian pemerintah Amerika dengan isu perlombaan pengembangan senjata nuklir. Namun, dalam perkembangan lain di Asia Tenggara, China memperlihatkan bagaimana untuk tumbuh sebagai sebuah kekuatan baru pada bidang ekonomi dengan penguasaan pasar. Fenomena kekuatan China tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mengalihkan perhatian Amerika untuk meningkatkan peran di Asia Tenggara.

Ketertarikan Jepang pada Asia Tenggara bukanlah suatu hal yang baru, Jepang telah memulai hubungan kerjasama formal dari tahun 1977. Asia Tenggara merupakan wilayah yang tidak hanya penting bagi Jepang dengan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh industrialisasi di Jepang, namun, secara geografis kawasan Asia Tenggara penting bagi Jepang. Pentingnya Asia Tenggara di mata Jepang dapat terlihat dari upaya sistematis Jepang dalam membangun hubungan yang erat dengan ASEAN dari tahun 1977 hingga 2004, Jepang telah menjalankan tiga Doktrin untuk menjalin hubungan dengan ASEAN, yakni Doktrin

Fukuda, Takeshita, dan Hashimoto, yang secara keseluruhan menekankan arti penting hubungan yang erat antara Jepang dengan ASEAN.

Secara ekonomi Asia Tenggara merupakan bagian perdagangan dengan nilai yang tinggi bagi Amerika dibandingkan dengan Jepang, Korea, Taiwan, dan Australia, termasuk impor minyak. Sedangkan dalam perspektif militer, jalur laut Asia Tenggara sangat penting untuk pergerakan Angkatan Bersenjata Amerika dari Pasifik Barat menuju Samudra Hindia dan Teluk Persia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar secara tidak langsung Asia Tenggara merupakan pasar yang luas tidak hanya pada sektor produk tetapi pada sektor industri dan jasa Amerika. Kepentingan Amerika di Asia Tenggara, sebagai partner ekspor impor, pasar produk dan industri jasa, dan investasi asing. (Triwahyuni, 2004:34-36)

China yang merupakan rival serta kompetitor utama Jepang dan Amerika yang dijadikan oleh ASEAN sebagai mitra dialog penuh. Dengan terbentuknya ASEAN+3 dan dengan China menjadi full dialog partner ASEAN, China memiliki potensi dan peluang yang lebih besar dari sebelumnya untuk menyaingi dan bahkan menggantikan posisi Jepang dan Amerika di kawasan Asia Tenggara. Adanya kerjasama ACFTA sebagai bukti bahwa kedekatan antara ASEAN dan China semakin memuncak dan menguat. Disamping itu, menguatnya hubungan China dan ASEAN di awal dekade 90-an dengan melakukan diplomasi aktif terhadap kawasan Asia Tenggara merupakan bukti bahwa persepsi the China Threat tidak sepenuhnya dapat ditelan oleh negara-negara Asia Tenggara. (Sastrowiranu, 2007: 50-53)

China sebuah kekuatan yang digadang-gadang menjadi titik balik bagi Asia Tenggara untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara barat. Kehadiran China memiliki arti tersendiri bagi Amerika dan Jepang, bagaimana tidak gelembung ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan bebas ASEAN-China mampu mengimbangi dominasi Amerika dan Jepang di Asia Tenggara. Dengan efektifitas dari ACFTA yang didukung dengan zona geografis serta kemampuan China dalam memproduksi barang-barang murah yang berkualitas. ACFTA memiliki potensi membawa perubahan positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN. Negara-negara ASEAN mendapatkan keuntungan dari sebuah combine market yang besar. Namun, bagi Jepang ACFTA merupakan suatu pukulan tersendiri. John Wong berpendapat bahwa “Disamping menciptakan sumber daya baru bagi pertumbuhan ekonomi pada sebuah wilayah. China juga merupakan sebuah kekuatan baru dalam merevitalisasi proses integrasi ekonomi kawasan. Free Trade Area China dengan ASEAN telah memberikan tekanan luar biasa kepada Jepang dan Korea agar dapat mengikuti”. (Wong, 2006:29) Jepang segera mengambil tindakan dengan menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi dengan ASEAN, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya FTA, namun dapat mempererat perjanjian-perjanjian FTA bilateral Jepang dengan negara-negara ASEAN.

Semenjak ASEAN berdiri, Jepang menjadi mitra perdagangan utama ASEAN dan investasi Jepang pada bidang industri telah mewarnai perkembangan perekonomian negara-negara ASEAN. Namun, pasca krisis ekonomi melanda ASEAN, China semakin intens dalam menjalin hubungan perdagangan dengan ASEAN. Tidak hanya sampai disitu, ASEAN telah

menikmati surplus perdagangan yang mendorong pertumbuhan signifikan di Vietnam (8,5%), Singapura (8,1%), Malaysia (7%) dan Thailand (6%) pada tahun 2004.

Dalam sektor investasi, China telah sepakat untuk membangun beberapa pembangkit listrik di Jawa dan hal yang menarik bahwa China bersedia menawarkan dengan harga persahabatan kepada Indonesia untuk listrik yang disediakan pembangkit-pembangkit listrik tersebut. Harga persahabatan yang ditawarkan China tersebut tidak akan dapat disaingi oleh perusahaan-perusahaan Jepang maupun Amerika. (Cheow, 2007:333) China juga menyatakan niatan untuk membangun bendungan dan infrastruktur jalan raya sebagai bagian dari Overseas Development Assistance China. Di Laos, China telah menjadi donor bantuan terbesar kedua setelah Jepang. Di Filipina, China telah sepakat untuk memberikan paket bantuan sebesar 400 juta dolar untuk pembangunan jalur kereta api. Secara keseluruhan, China telah menggeser Jepang dalam menjadi donor bantuan nomor satu di wilayah Asia Tenggara.

Kemajuan-kemajuan yang dialami oleh China, pasca Perang Dingin, telah berakibat pada meningkatnya kekuatan ekonomi China. Dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh menjadi semakin besar, China memiliki kesempatan untuk dapat menggunakan kekuatan ekonomi untuk menyebarkan pengaruh dan sebagai bentuk hegemoni ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Meningkatnya perdagangan antara ASEAN dan China terus menunjukkan peningkatan. China termasuk mitra dagang penting sebagai tujuan ekspor ASEAN dan sebaliknya. Keunggulan China dalam hal pasar ASEAN tidak dapat ditepis oleh Amerika. Bahkan dalam ekspor negara-negara ASEAN didominasi dengan tujuan ekspor ke China. Pertumbuhan ekonomi China yang kurang dari dua digit angka. Dengan jumlah penduduk mencapai 2 miliar lebih menjadikan China sebagai pasar sekaligus produsen utama industri manufaktur. Taraf hidup masyarakat China yang mayoritas kelas menengah menjadikan harga upah bersaing dan cenderung murah. Sehingga menjadikan China lebih diminati oleh negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan data export negara-negara anggota ASEAN dari tahun 2008 hingga 2014, menunjukkan dominasi export terbesar tertuju ke China. Hal ini merupakan tamparan keras bagi Amerika dan Jepang, usaha untuk kembali meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi kepada Asia Tenggara terlihat sangatlah sulit untuk bersaing dengan China yang telah memulai terlebih dahulu.

Dominasi Amerika atas Asia Tenggara secara perlahan terus tergeser oleh kebangkitan ekonomi China. Tidak heran berbagai macam kepentingan Amerika dipaksa masuk ke Asia Tenggara melalui penempatan posko-posko militer di Asia Tenggara guna menahan dominasi hegemoni ekonomi yang kini berada di pihak China. Strategi yang ditempuh Amerika dalam menghadapi China dengan isu dilema keamanan dan satu contoh yang menggambarkan hal tersebut adalah kasus Taiwan. Dalam hal ini, Amerika memiliki kepentingan untuk menciptakan perimbangan kekuatan antara Taiwan dan China. Kepentingan tersebut dikejar dengan cara menjual persenjataan kepada Taiwan. Hingga saat ini, China adalah satu-satunya negara di dunia yang menentang hegemoni Amerika di Kawasan Asia Tenggara, baik ditinjau secara sudut pandang nilai ekonomi maupun dalam prespektif kepentingan nasional. (Sastrowiranu, 2007:66)

Tributary System Merupakan Jejak Pengaruh China di Kawasan Asia Tenggara

Sistem Upeti atau Tributary System merupakan sistem manajemen hubungan luar negeri yang secara umum digunakan oleh kekaisaran China pada masa lampau dengan tujuan utamanya adalah kekuasaan (politik) dengan menggunakan motif ekonomi. Kekuasaan tercapai ketika negara-negara peri peri telah memberi upeti terhadap China sebagai balas budi dan ketika masyarakat di kawasan peri peri merasa percaya, disitulah pihak negara inti menyebarkan pengaruh kepada masyarakat peri peri.

Tributary system pada masa Qing dan Ming didasarkan atas tiga hal, pertama adalah China menganggap bahwa dirinya merupakan Central Heart di kawasan regional, dimana China telah menjamin seluruh keamanan kawasan tersebut. Kedua adalah China membutuhkan daerah diluar daerah inti untuk menjamin stabilitas internal dan kesejahteraan daerah inti. Ketiga, daerah inti akan memberi jaminan kepada Negara peri peri dan Negara peri peri menganggap bahwa itu merupakan kebaikan dari sang raja, lalu mereka akan menghormati dan terus memberi upeti kepada raja juga terus memberikan jaminan kepada mereka.

Pada dasarnya, tributary system telah berlangsung pada masa kekaisaran Qing dan Ming. Secara geografis yang saat ini dikenal sebagai Korea Selatan, Okinawa, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos merupakan bagian dari sistem tersebut. Wilayah-wilayah tersebut pada saat ini termasuk kedalam negara-negara ASEAN yang mana China telah melakukan kerjasama ACFTA.

Tributary System yang berdasarkan ide dari China, konsesi perdagangan ACFTA berada dalam lingkaran prinsip pembalasan. EHP akan menjadi hadiah unilateral China kepada ASEAN tanpa kondisi pertentangan atas adanya pengurangan tariff oleh ASEAN, China bersikeras pada pembalasan karena kondisi yang memungkinkan untuk menerima EHP.

Pada masa lajunya proses globalisasi dan liberalisasi China tidak mungkin untuk kembali menerapkan Tributary System atas negara-negara anggota ASEAN yang dimana menekankan kepada sentralisasi China. Namun, dengan pernah berlakunya Tributary System merupakan sebuah penegasan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan bagian kawasan yang pernah menjadi pengaruh kekuatan China di masa sebelumnya. Kerjasama ACFTA yang telah disepakati antara China dan ASEAN merupakan bentuk kembalinya China atas kawasan Asia Tenggara dengan menegaskan ulang atas pengaruh China melalui bentuk yang telah bertransformasi menjadi lebih bersahabat yaitu kerjasama ekonomi tepatnya melalui pintu kerjasama ACFTA.

D. KESIMPULAN

China beberapa kali mengalami revolusi yang panjang pasca runtuhnya masa Dinasti Ching. Masa revolusi yang panjang dengan sendirinya melahirkan para pemimpin yang mampu membawa China hingga masa dimana sektor ekonomi sebagai wadah kekuatan besar. Kekuatan ekonomi China yang luar biasa merupakan magnet pusat industri manufaktur

dunia, jasa penyedia dana paling terkemuka, investor utama di dunia, serta sumber riset dan pengembangan ilmu sains yang semakin meluas.

Dengan reformasi sistem ekonomi, China berhasil menerapkan politik “pintu terbuka”, modal asing diundang masuk dengan diberikan banyak kemudahan. Alhasil memang luar biasa. Investasi asing (FDI) berbondong memasuki China pada 1998-2001. Dengan ini China mulai menggantikan Amerika sebagai tempat FDI yang menarik perhatian dunia. China pun tidak berhenti sampai disitu, China mulai melirik ke Asia Tenggara sebagai mitra yang berpotensi dalam membangun dan mengembangkan sektor perekonomian dan perdagangan.

ASEAN secara tegas memiliki dimensi yang condong terhadap ekonomi dan sosial. Hal tersebut selaras dengan sasaran China untuk membentuk FTA dengan ASEAN yang bersumber pada dinamika faktor internal maupun internasional. Semua hal tersebut menempatkan ASEAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan ekonomi China, sehingga China terus berusaha untuk mendekati diri kepada ASEAN. Hingga pada 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan terbentuklah kerjasama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) ditandai dengan penandatanganan ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation oleh kepala negara anggota ASEAN dan China.

Dalam perkembangan jangka pendek dari penerapan ACFTA akan melemahkan sektor manufaktur negara-negara ASEAN. Sebagai timbal balik, China memberikan keuntungan kepada ASEAN melalui ekspor komoditi barang jadi, sebagai penunjang dari kelangsungan proses industrialisasi yang terjadi di China. Sebagai produsen bahan baku dan energi, negara-negara ASEAN akan diuntungkan, namun sebagai produsen barang-barang manufaktur, China akan lebih diuntungkan.

Negara-negara ASEAN telah mendirikan intergenerasi secara bersama sebagai rantai kebutuhan dengan China, sebagian besar fungsi China sebagai negara manufaktur dan industri. Saham ASEAN pada perdagangan China terus tumbuh dan menguat di dunia.

Namun, disamping kerjasama ACFTA yang telah dibangun ada dua hal yang menjadi hipotesa dalam skripsi ini dan merupakan fokus utama, Pertama, kekuatan China dengan potensi pasar yang besar akan meningkatkan permintaan produk barang dan jasa serta barang modal. Kebutuhan akan sumber daya energi merupakan faktor utama China untuk dapat terus melangsungkan usaha ekspor pasar yang terus melesat tinggi. Disamping itu China selalu kekurangan sumber daya energi guna memenuhi kebutuhan industrialisasi. Negara-negara Asia Tenggara yang berkembang di kawasan merupakan negara yang menjadi mitra strategis China dalam memenuhi kebutuhan energi. Pendekatan kerjasama ekonomi menjadi salah satu pilihan efektif agar mendapatkan jaminan akses energi.

Kehadiran kerjasama ACFTA merupakan sebuah wadah untuk saling memberikan kesempatan antara ASEAN dan China agar dapat bertukar kebutuhan atas permintaan pasar. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan negara-negara ASEAN atas barang jadi dari China merupakan aspek yang penting, China mendapat keuntungan mutlak dengan biaya produksi yang lebih rendah dari negara-negara lain dengan kualitas yang sama. Guna menopang

kebutuhan industrialisasi China harus menempuh jalur impor dari negara-negara yang memiliki potensi sumber energi jangka panjang dan strategis secara geografis. Sehingga kerjasama ACFTA merupakan bentuk mata rantai yang saling menghubungkan antara kebutuhan China atas sumber energi pada masa sekarang dan masa depan serta kebutuhan negara-negara Asia Tenggara akan barang jadi dari China.

Kedua, suatu negara akan dipresepsikan sebagai suatu ancaman bagi negara-negara lain terutama dalam sebuah hegemoni jika negara tersebut menjadi semakin kuat dan besar, baik dari aspek ekonomi-politik, dan militer. China sebagai mitra dagang yang penting dengan tujuan ekspor ke ASEAN dan sebaliknya. Keunggulan China dalam hal pasar ASEAN tidak dapat ditepis oleh Amerika dan Jepang. Bahkan dalam ekspor negara-negara ASEAN didominasi dengan tujuan ekspor ke China dan merupakan tujuan ekspor terbesar ASEAN.

Dominasi Amerika atas Asia Tenggara secara perlahan terus tergeser oleh kebangkitan ekonomi China. Amerika dan Jepang patut melihat China dengan penuh kekhawatiran. Dominasi China yang tumbuh di Asia Tenggara tidak dapat dipungkiri. Adanya kerjasama ACFTA sebagai buah hasil dari usaha pendekatan China selama beberapa tahun, terlihat secara nyata dalam bentuk kerjasama perdagangan bebas. Saling membutuhkan antara China dan ASEAN dalam bidang ekonomi sebagai partner ekspor dan impor, pasar produk dan industri jasa, dan investasi.

Sehingga, China tidak memiliki pilihan lain bahwa Asia Tenggara tetap akan menjadi prioritas utama untuk kelancaran perekonomian dan merupakan kawasan dengan kunci sumber daya energi. Dominasi Amerika dan Jepang yang telah berdiri sejak lama di Asia Tenggara semakin melemah dan bahkan hampir tidak mampu menandingi kekuatan ekonomi China. Bahwa hegemoni pada sosial dan politik atas negara-negara kota sebagai mana dikemukakan oleh Antonio Gramsci dalam hal ini telah mengarah kepada dominasi ekonomi China atas kawasan Asia Tenggara. Dominasi ekonomi China di kawasan Asia Tenggara harus diakui secara langsung oleh Amerika dan Jepang, proses serta tekanan yang sebelumnya didapatkan China sepadan dengan hasil yang dituai China pada saat ini.

Hal ini kembali dipertegas bahwa Sistem Upeti atau Tributary System merupakan sistem manajemen hubungan luar negeri yang secara umum digunakan oleh kekaisaran China pada masa lampau bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan bagian kawasan yang pernah menjadi pengaruh kekuatan China di masa sebelumnya. Kerjasama ACFTA yang telah disepakati antara China dan ASEAN merupakan bentuk kembalinya China atas kawasan Asia Tenggara dengan menegaskan ulang atas pengaruh China melalui bentuk yang telah bertransformasi menjadi lebih bersahabat yaitu kerjasama ekonomi tepatnya melalui pintu kerjasama ACFTA.

DAFTAR PUTAKA

- Alhumami, Amichi. "Moderenisasi Ekonomi-Politik China", *Department of Anthropology University of Sussex*. [Online]. Tersedia:
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11216&coid=4&caid=33&gid=2.
[10 Februari 2016]
- Bawono, Anton. (2008). *Sosialisme Pasar: Sebuah Reformasi Sistem Ekonomi Di Cina*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Burmansyah, Edy. (2014). *Rezim Baru ASEAN*. Yogyakarta: Pustaka Sempu.
- Cheng, Joseph Y. S. (2013). "China-ASEAN Economic Co-operation and the Role of Provinces". *Journal of Contemporary Asia*. 43, (2).
- Cheow, Eric Teo Chu. (2007). "Strategic Dimension of ASEAN-China Economic Relations". Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Chow, Micahel Ewing. (2006). "ASEAN Features ASEAN-China F.T.A.: Trade Or Tribute?". *Year Book of International Law and Contributor*. Singapore.
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ciptowiyono, Isharyanto. (2013). "Kecenderungan Kebijakan Energi Cina dan India". Kompasiana. [Online]. Tersedia:
http://www.kompasiana.com/isharyanto/kecenderungan-kebijakan-energi-cina-dan-india_552c48c86ea834de458b4595. [18 April 2016]
- Direktorat Kerjasama Regional. *ASEAN-China Free Trade Area*. Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. [Online]. Tersedia:
<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>. [5 Maret 2016]
- Jurnal Penelitian Politik. (2007). "Demokrasi Mati Suri". *LIPi*. Jakarta. 4, (1).

- Kerja Usaha. Pengaruh Ekonomi China terhadap Dunia. *Kerja Usaha*. [Online]. Tersedia: <http://www.kerjausaha.com/2015/08/pengaruh-ekonomi-china-terhadap-dunia.html>. [12 Februari 2016]
- Koesmawan. (2002). “Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke China”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 7, (2). [Online]. Tersedia: <http://www.library.gunadarma.ac.id/journal/view/2956/penentuan-jenis-komoditas-ekspor-indonesia-ke-china-pemanfaatan-hubungan-perdagangan-indonesia-china.html/>. [8 Februari 2016]
- Kustia, A. “Memahami Reformasi RRC”, *Duta Besar RI di Beijing*, [Online]. Tersedia: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1322&coid=3&caid=22&gid=2. [9 Februari 2016]
- Nugroho, Nurfajri Budi. Pengaruh Global China, ACFTA, & Posisi Indonesia. *Kompas*. [Online]. Tersedia: http://www.kompasiana.com/fajribudi/pengaruh-global-china-acfta-amp-posisi-indonesia_54ffc881a33311716850f8b8. [11 Februari 2016]
- Nugroho, Priyanto. China Sibuk Membeli Dunia. *Kompas*. [Online]. Tersedia: http://www.kompasiana.com/priyanto_nugroho/china-sibuk-membeli-dunia_550017f8813311255efa7362. [12 Februari 2016]
- Peerenboom, Randall. (2007). *China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest*. USA: Oxford University Press. [Online]. Tersedia: [www.e-reading.club/bookreader.php/136417/China_Modernizes. Threat to the West or Model for the Rest%3F.pdf](http://www.e-reading.club/bookreader.php/136417/China_Modernizes._Threat_to_the_West_or_Model_for_the_Rest%3F.pdf), [9 Februari 2016]
- Prabowo, Diiby. (2004). *AFTA Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Rodrik, Dani. “Akankah Cina Menguasai Dunia?”. [Online]. Tersedia: http://www.unisosdem.org/article_detail.php%3Faid%3D11671%26coid%3D4%26caid%3D4%26gid%3D4. [8 Februari 2016]
- Salim, Fahrudin. “Memanfaatkan Kebangkitan Ekonomi China”, *Uni Sosial Demokrat*. [Online]. Tersedia: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6866&coid=4&caid=33&gid=2. [18 April 2016]

- Sastrowiranu, Mulyanto. (2007). “Upaya Jepang Untuk Mengatasi Peningkatan Peran China di Kawasan Asia Timur”, *Universitas Indonesia*.
- Sumaryadi, N. S. (2001). *Global Trade Liberalization: Its Impact on the Export Competitiveness of China and Asean 5 in the United States Market*. Yogyakarta: Gadjah Mada International Journal of Business III.
- The World Population and The Top Ten Countries With The Highest Population. [Online]. Tersedia: <http://www.internetworldstats.com/stats8.htm>. [24 Maret 2016]
- Timmons, H. “The massive, aging oil fields at the heart of China’s latest corruption purge”. *Quartz*. [Online]. Tersedia: <http://qz.com/121130/there-is-a-monster-aging-oil-field-at-the-heart-of-chinas-petro-purge/>. [18 April 2016]
- Triwahyuni, Dewi. (2004). “Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat”. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. 9, (1).
- U.S. Energy Information Administration. *China’s Key Energy Statistic*. [Online]. Tersedia: <http://www.eia.gov/countries/countries-data.cfm?fips=ch>. [18 April 2016]
- Wesley. (2007). “Energy Security in Asia”. *Routledge Asia-Pacific Series*. Oxon.
- Wibowo, Alif Fikri. (2011). “Pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA) dan Hubungan Ekonomi ASEAN-Cina”. *UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Wong, John. (2006). “Southeast Asia’s Chinese Businesses in an Era of Globalization”. *Institute of Southeast Asian Studies*. Singapore.
- World Energy Outlook Special Report. (2013). Southeast Asia Energy Outlook. International Energy Outlook.